BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara yang sedang berkembang. Istilah kemiskinan itu sendiri muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimalnya dari standar hidup tertentu. Menurut *World Bank*, salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang diterima. kemiskinan juga tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, akan tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan utama yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan juga harus dilakukan secara berkala dan terpadu sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan pembangunan itu sendiri.

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh setiap negara di dunia. Dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 secara jelas mengakui hal tersebut

dengan menegaskan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu berarti bahwa hidup bebas dan keluar dari kemiskinan serta mendapatkan kehidupan yang layak adalah hak asasi setiap warga negara sebagai rakyat Indonesia. Pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu pengentasan kemiskinan merupakan tujuan awal dan prioritas utama dalam proses pembangunan.

Permasalahan kemiskinan juga terjadi di Provinsi Banten. Dari data yang ada, persentase angka kemiskinan di Provinsi Banten terlihat menurun, meski beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan. Berikut Data persentase kemiskinan di Provinsi Banten beberapa tahun terakhir.

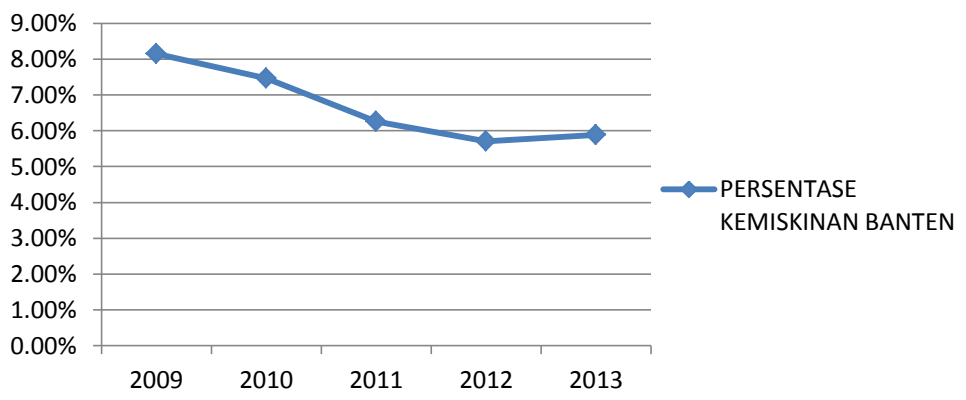

Gambar 1.1
PERSENTASE KEMISKINAN BANTEN

Sumber : Diolah dari data BPS, 2013

Dilihat dari data diatas, persentase penduduk miskin di Provinsi Banten terlihat mengalami tren yang menurun. Namun, permasalahan yang terjadi adalah

penurunan persentase angka kemiskinan tiap tahunnya berjalan sangat lambat. Tidak lebih dari 1% penduduk dapat keluar dari jurang kemiskinan tiap tahunnya. Terlebih pada tahun 2013, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari 5,71% menjadi 5,89%.

Dimas Kusuma, Koordinator Lembaga Kajian Independen (LKI) menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten tergolong rendah. Beliau juga menyatakan bahwa keadaan ini terjadi akibat TKPK tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masyarakat Banten tidak mampu menyalurkan aspirasi dan keluhan yang ada.[1]

Banten yang merupakan Provinsi yang baru berdiri sesuai dengan keputusan UU nomor 23 tahun 2000[2], juga mempunyai angka kemiskinan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lain yang juga baru berdiri di Indonesia. Menurut LKI, Provinsi Banten mempunyai angka kemiskinan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Bangka Belitung yang juga baru berdiri tahun 2001. Dari data BPS yang ada, pada tahun 2013 angka kemiskinan di Banten sebesar 5,89% sedangkan Bangka Belitung sebesar 5,25%.[3]

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang serius dan sistematis serta terarah agar permasalaan kemiskinan dapat segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu negara atau daerah. Menurut Tarmizi A. Karim, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat

---

[1]http://www.jakpro.id/pemprov-banten-belum-mampu-selesaikan-masalah-kemiskinan-danpengangguran/ (Diakses tanggal 08 Mei 2015)

[2]http://id.wikipedia.org/wiki/Banten (Diakses tanggal 08 Mei 2015)

[3]http://www.jakpro.id/pemprov-banten-belum-mampu-selesaikan-masalah-kemiskinan-danpengangguran/ (Diakses tanggal 08 Mei 2015)

Desa (PMD) menyatakan bahwa pemahaman TKPK tentang apa yang menjadi prioritas utama dalam menanggulangi kemiskinan diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan hingga 10%.[4]

Kemiskinan erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Pulau jawa sebagai pusat kemiskinan juga mempunyai angka jumlah penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan pulau lainnya. Menurut Badan Informasi Kependudukan Bangka Belitung mengatakan bahwa ujung dari pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan rakyat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan negara.[5] Jumlah penduduk Provinsi Banten menurut BPS mencapai 11,83 juta jiwa pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2009 hanya berjumlah 9,78 juta jiwa. Muhadi, Sekda Banten juga mengatakan bahwa Provinsi Banten menduduki peringkat lima besar dalam laju pertumbuhan penduduk setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa tengah dan Sumatra Utara.[6]

Pendidikan merupakan hal pokok yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan selalu menjadi faktor utama dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan. Teguh Darnando Ph.D mengatakan bahwa pendidikan yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinannya. Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa pendidikan akan memberikan pengaruh dalam jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan

---

[4]http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/index/?start_rec=54 (Diakses tanggal 08 Mei 2015)

[5]http://infoduk.babelprov.go.id/content/pertumbuhan-penduduk-yang-tinggi-dan-dampaknya(Diakses tanggal 08 Mei 2015)

[6]http://tanggerangekspres.com/duduki-peringkat-lima-tingkat-nasional-penduduk-banten-membengkak (Diakses tanggal 09 Mei 2015)

ekonomi keluarga.[7] Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa melalui pendidikan kita dapat menanamkan sikap yang pas dan membeli bekal kompetensi yang diperlukan kepada manusia sebagai penentu kemajuan bangsa.[8] Salah satu indikator dalam melihat kualitas pendidikan disuatu negara adalah dengan melihat besar kecilnya Angka Melek Huruf (AMH) yang ada. Menurut data yang ada, AMH di provinsi Banten tahun 2010 96,20% dan 96,25% pada tahun 2011, AMH mengalami kenaikan tidak lebih dari 0,5%. Pada tahun 2013 AMH juga mengalami peningkatan dari 96,51 di tahun 2012 menjadi 96,87 ditahun 2013.[9] Data yang ada juga menyebutkan bahwa 3,75% dari jumlah penduduk banten yang mencapai 10,63juta jiwa merupakan penyandang buta aksara. Hudaya Latuconsina, kepala dinas pendidikan Banten mengatakan tingginya angka buta huruf memang menjadi prioritas utama Disdik Banten.[10]

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan dari pembangunan di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diharapkan mampu memberantas pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang nantinya berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Menurut duta besar Amerika untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini mampu mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran karena terbukanya kesempatan kerja yang besar dari berbagai sektor yang ada.[11] Di Provinsi Banten, dari data yang ada angka laju pertumbuhan PDRB mengalami

---

[7]http://www.fe.ui.ac.id/index.php/berita/744-pendidikan-jalan-keluar-indonesia-terbebas-dari-kemiskinan (Diakses tanggal 08 Mei 2015)

8http://wapresri.go.id/index/preview/karya/2358 (Diakses tanggal 08 Mei 2015)

[9]http://pattiro.org/?p=1069 (Diakses tanggal 08 Mei 2015)

[10]http://www.kabar-banten.com/news/detail/7964 (Diakses tanggal 08 Mei 2015)

[11]http://www.beritasatu.com/ekonomi/263179-mcc-perangi-kemiskinan-lewat-pertumbuhan-ekonomi.html (Diakses tanggal 08 Maret 2015)

fluktuasi dari tahun ke tahun, berikut data laju pertumbuhan PDRB Provinsi Banten lima tahun terakhir

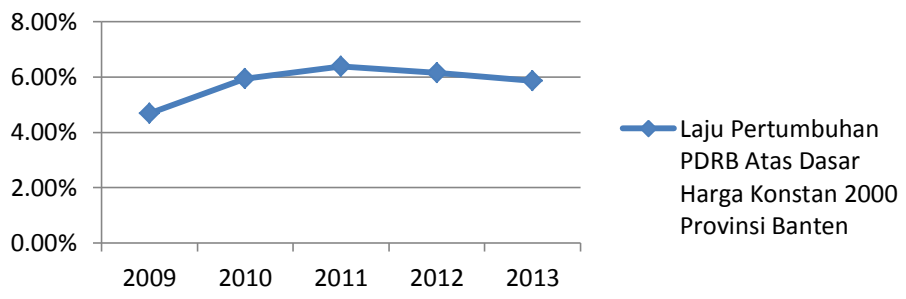

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Banten

Sumber : Diolah dari data BPS, 2013

dari data yang ada diatas, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir, dimulai dari tahun 2009-2013, PDRB Provinsi Banten hanya naik sekitar 1,17%. Rendahnya laju pertumbuhan PDRB tersebut menyebabkan tingginya angka pengangguran yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kemiskinan di Provinsi Banten.

Tingginya angka pengangguran akan berdampak pada rendahnya angka kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Banten merupakan provinsi yang mempunyai angka pengangguran yang tinggi. Pada tahun 2014, BPS mencatat pengangguran di Banten mencapai angka 519.000 jiwa atau sekitar 5,73 persen dari 7 juta penduduk Provinsi Banten merupakan pengangguran.[12]Selain itu, Banten juga di nobatkan sebagai provinsi dengan persentase angka pengangguran

[12]http://www.indopos.co.id/2014/tingkat-pengangguran-di-banten-tinggi.html (Diakses tanggal 10 Maret 2015)

tertinggi di Pulau Jawa, di susul DKI Jakarta dan Pulau Jawa.[13] Menurut Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi Banten, Asmudji HW, angka pengangguran di Banten sangat tinggi, bahkan melebihi angka rata-rata nasional.[14]

Terbatasnya akses dan rendahnya pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor tingginya angka kemiskinan. masyarakat miskin biasanya rendah terhadap akses kesehatan untuk dirinya sendiri. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.[15] Menurut Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, AMH banten tergolong masih rendah dan merupakan penyumbang terbesar bagi rendahnya IPM di Provinsi Banten.[16]Pada tahun 2012, AHH Provinsi Banten hanya sebesar 65,2 Tahun. Selain itu, Banten juga merupakan Provinsi yang yang mempunyai AHH paling rendah jika dibandingkan dengn provinsi lain di Pulau Jawa.[17]

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Jumlah Penduduk dengan kemiskinan di Provinsi Banten
2. Terdapat pengaruh antara Angka Melek Huruf (AMH) dengan kemiskinan di Provinsi Banten

---

[13]http://bisnis/industri/read/20130901/12/160039/inilah-10-provinsi-dengan-penangguran-tertinggi (Diakses tanggal 10 Maret 2015)

[14]http://www.antaranews.com/berita/452281/angka-pengangguran-banten-masih-tinggi (Diakses tanggal 10 Maret 2015)

[15]http://www.bantenprov.go.id (Diakses tanggal 11 Maret 2015)

[16]http://www.antarabanten.com/berita/19945/wagub-ipm-banten-masih-rendah (Diakses tanggal 11 Maret 2015)

[17]http://www. kompasiana.com/post/read/61754/kualitas-pembangunan-manusia-banten (Diakses tanggal 11 Maret 2015)

3. Terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kemiskinan di Provinsi Banten
4. Terdapat pengaruh antara tingkat Pengangguran dengan kemiskinan di Provinsi Banten
5. Terdapat pengaruh antara tingkat Kesehatan dengan kemiskinan di Provinsi Banten

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu:

1. Pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.
2. Pengaruh antara Angka Melek Huruf (AMH) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.
3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten?
2. Apakah ada pengaruh antara Angka Melek Huruf (AMH) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten?

3. Apakah ada pengaruh antara jumlah penduduk miskin terhadap jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Banten?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian ekonomi pembangunan dan menambah pengetahuan terutama dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Melek Huruf (AMH) terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.

2. Manfaat Praktis

   Dapat dijadikan dasar yang digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dan dijadikan referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa/i ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang kemiskinan terutama di provinsi Banten.